

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Secara umum, implementasi *Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019* tentang Karang Taruna di Kelurahan Mekarjaya telah dilakukan melalui serangkaian kegiatan kelembagaan yang melibatkan pemuda sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut mencakup program sosial, pelatihan keterampilan, kegiatan keagamaan, serta penguatan struktur internal organisasi. Meskipun demikian, capaian yang dihasilkan belum sepenuhnya sesuai dengan target dan amanat kebijakan. Hal ini terlihat dari belum optimalnya pelaksanaan program di berbagai bidang, serta belum meratanya dampak kebijakan terhadap seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda.

Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, pelaksanaan kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh empat variabel kunci, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam aspek komunikasi, meskipun terdapat saluran koordinasi antara pemerintah kelurahan, Dinas Sosial, dan pengurus Karang Taruna, namun penyampaian informasi belum berlangsung secara intensif dan konsisten. Sosialisasi kebijakan yang masih bersifat formalitas membuat pemahaman pelaksana di tingkat lapangan tidak menyeluruh. Akibatnya, terdapat kesenjangan interpretasi terhadap tujuan dan mekanisme kebijakan, sehingga pelaksanaannya kurang terarah dan terstandarisasi.

Dalam hal sumber daya, hambatan yang paling dominan adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, minimnya regenerasi pengurus, serta rendahnya ketersediaan dana dan fasilitas pendukung. Sumber daya manusia yang terlibat belum sepenuhnya memiliki keterampilan manajerial dan inovatif untuk mengembangkan program kerja yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, dana operasional yang terbatas mengakibatkan sebagian program tidak dapat berjalan secara berkelanjutan, dan fasilitas yang ada belum memadai untuk menunjang kegiatan yang berskala lebih luas.

Dari aspek disposisi, meskipun pelaksana di tingkat kelurahan menunjukkan semangat dan niat baik untuk menjalankan kebijakan, namun komitmen dan

inisiatif mandiri masih terbatas. Banyak pelaksana yang cenderung menunggu arahan atau instruksi formal dari pihak atasan sebelum mengambil langkah. Sikap pasif ini berdampak pada kurangnya kreativitas dan inovasi program yang seharusnya mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Sementara itu, struktur birokrasi yang ada belum sepenuhnya mendukung implementasi yang efektif, karena mekanisme koordinasi dan pembagian peran antara Karang Taruna, pemerintah kelurahan, dan instansi terkait masih belum jelas dan terstruktur.

Walaupun dihadapkan pada sejumlah kendala, implementasi Permenses No. 25 Tahun 2019 di Kelurahan Mekarjaya tetap membawa dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan partisipasi pemuda pada kegiatan sosial, keagamaan, dan pengembangan keterampilan. Keberadaan Karang Taruna menjadi wadah strategis dalam menggerakkan potensi generasi muda. Namun, untuk mewujudkan implementasi yang lebih efektif dan berkelanjutan, diperlukan perbaikan menyeluruh dalam aspek komunikasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan struktur kelembagaan, serta dukungan anggaran dan regulasi operasional yang lebih jelas di tingkat lokal.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak terkait guna meningkatkan implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna di Kelurahan Mekarjaya Kota Depok:

### 5.2.1 Bagi Pemerintah Kota Depok (khususnya Dinas Sosial dan Kelurahan Mekarjaya)

- Pemerintah perlu menyusun program sosialisasi kebijakan yang sistematis dan berkelanjutan guna memastikan seluruh pengurus dan anggota Karang Taruna memahami substansi, tujuan, serta kewenangan yang diatur dalam Permenses No. 25 Tahun 2019.
- Penting bagi pemerintah untuk menyediakan pelatihan berbasis kompetensi dalam bidang manajemen organisasi, kepemimpinan pemuda, dan kewirausahaan sosial guna meningkatkan kapasitas sumber

daya manusia Karang Taruna secara menyeluruh.

- Alokasi anggaran untuk Karang Taruna sebaiknya ditingkatkan secara proporsional sesuai dengan kompleksitas program kerja yang direncanakan, serta disertai dengan mekanisme distribusi dana yang transparan dan akuntabel.
- Koordinasi lintas sektor antara pemerintah kelurahan, kecamatan, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat perlu diperkuat melalui pembentukan forum kemitraan dan sistem pendampingan berjenjang.
- Pemerintah juga diharapkan menyusun dan mendistribusikan Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis pelaksanaan program Karang Taruna yang seragam namun adaptif terhadap kebutuhan lokal.
- Mendorong integrasi sistem digitalisasi administrasi organisasi Karang Taruna di tingkat kelurahan sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan tata kelola berbasis teknologi informasi.

### **5.2.2 Bagi Pengurus dan Anggota Karang Taruna Kelurahan Mekarjaya**

- Pengurus Karang Taruna diharapkan meningkatkan inisiatif dalam menyusun dan melaksanakan program kerja yang kontekstual dengan kebutuhan masyarakat lokal serta mampu menjawab tantangan sosial yang berkembang.
- Perlu adanya upaya mandiri dari anggota Karang Taruna untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kapasitas diri melalui pelatihan, diskusi kepemudaan, dan partisipasi dalam forum pengembangan keterampilan.
- Karang Taruna perlu mulai merancang strategi kemandirian organisasi, salah satunya melalui pengembangan unit usaha produktif yang berbasis komunitas dan potensi lokal agar tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan eksternal.
- Penguatan komunikasi internal antaranggota serta penciptaan iklim kerja yang kolaboratif dan terbuka menjadi langkah penting untuk

menjaga kohesi organisasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

- Dibutuhkan penguatan tata kelola organisasi, termasuk pembagian peran yang jelas, pembentukan tim kerja fungsional, serta mekanisme pelaporan yang terstruktur agar seluruh kegiatan berjalan secara profesional dan terarah.
- Perlu dikembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif dan menarik untuk menjangkau generasi muda, misalnya melalui pemanfaatan media sosial, kolaborasi dengan komunitas kreatif, serta penyelenggaraan kegiatan yang relevan dengan tren dan minat anak muda.

### **5.2.3 Bagi Masyarakat Kelurahan Mekarjaya**

- Masyarakat diharapkan terlibat aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Karang Taruna, baik sebagai peserta, pendukung, maupun pemberi masukan agar tercipta sinergi antara organisasi dan warga.
- Partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta evaluasi program Karang Taruna penting untuk menciptakan budaya organisasi yang transparan dan berorientasi pada pelayanan publik yang akuntabel.
- Masyarakat dapat mendukung Karang Taruna dengan menyediakan ruang kolaborasi dan kontribusi berupa sumber daya lokal, dukungan moral, ataupun jejaring kerja yang dapat memperluas dampak program.
- Diperlukan kesadaran kolektif dari masyarakat untuk memperlakukan Karang Taruna bukan sekadar organisasi pemuda, tetapi sebagai mitra strategis pemerintah dalam menciptakan perubahan sosial di tingkat lokal.
- Warga dapat turut berperan dalam menyebarluaskan informasi mengenai Karang Taruna dan mendorong generasi muda lainnya untuk terlibat, sehingga regenerasi kepemimpinan organisasi dapat berlangsung secara sehat dan berkelanjutan.

### **5.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya**

- Penelitian lanjutan disarankan untuk lebih mendalami aspek spesifik dari implementasi Permensos No. 25 Tahun 2019, misalnya pada efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan atau manajemen internal Karang Taruna.
- Menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan cakupan informan yang lebih luas dapat menghasilkan temuan yang lebih menyeluruh dan objektif mengenai dinamika kebijakan di tingkat kelurahan.
- Peneliti juga dapat mengkaji secara lebih kritis faktor eksternal yang memengaruhi kinerja Karang Taruna, seperti pengaruh media lokal, keterlibatan tokoh masyarakat, atau dampak regulasi lainnya dari sektor pembangunan sosial.
- Studi komparatif antarwilayah mengenai pelaksanaan Permensos No. 25 Tahun 2019 di beberapa kelurahan atau kecamatan yang berbeda dapat menjadi referensi penting untuk merumuskan kebijakan publik yang adaptif dan kontekstual.
- Diperlukan juga kajian mendalam tentang pola komunikasi organisasi, budaya kerja, serta dinamika hubungan antara pengurus Karang Taruna dan pemerintah setempat, agar dapat ditemukan model kemitraan yang ideal di tingkat lokal.

